



Anggota DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra

Kejar Pendapatan Rp 1 Triliun, Dorong Akselerasi Perizinan Usaha

Anggota DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra cukup menaruh perhatian terhadap iklim investasi di Kota Jogja. Oleh karena itu, politisi Partai Nasdem ini mendorong agar ada segera kepastian hukum dalam hal pendirian bangunan usaha.



Kota Jogja adalah kota pariwisata, sehingga menitikberatkan PAD dari sisi jasa.
DWI CANDRA PUTRA

CANDRA mengatakan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 20 persen dibandingkan tahun ini. Sehingga pemerintah kota (pemkot) harus mengejar pendapatan sebesar Rp. 1 triliun.

Hal tersebut, kata dia, sudah sesuai dengan implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Serta Peraturan Daerah (perda) Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). "Kota Jogja adalah kota pariwisata, sehingga menitikberatkan PAD dari sisi jasa," ujar Candra, Rabu (25/9).

Menurut Candra, belum lama ini pemkot telah memberi penghargaan bagi kalangan pengusaha yang tertib dalam hal pembayaran pajak. Namun di balik itu, faktanya banyak pengusaha yang was-was karena izin yang belum lengkap.

Oleh karena itu, dia berharap, agar pemkot segera merealisasikan akselerasi perizinan usaha bagi bangunan gedung atau



INVESTASI: Proyek pembangunan hotel di Jalan Sultan Agung, timur Jembatan Sayidan, Kota Jogja, Selasa (13/8). DPRD Kota Jogja mendorong agar ada kepastian hukum dalam hal pendirian bangunan usaha di Kota Jogja.

tempat usaha yang belum lengkap. Bagi para pengusaha yang belum lengkap pun diperlukan perlakuan khusus. Supaya dapat tercipta iklim investasi yang baik namun juga memberikan kepastian hukum.

Candra menilai, kurang lengkapnya perizinan usaha selama ini juga tidak jarang memberatkan kalangan pengusaha. Bahkan juga tidak jarang banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kurangnya kelengkapan izin dari para pengusaha tersebut demi keuntungan pribadi.

Sehingga, anggota legislatif yang berpengalaman di Komisi A



DPRD Kota Jogja periode lalu ini menyatakan, akselerasi perizinan gedung dan tempat usaha perlu segera diwujudkan. Dasarnya dapat dilakukan melalui dua perda.

Yakni Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Nomor 8 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Untuk wujudnya dapat melalui dikeluarkannya peraturan wali kota (perwal) tentang insentif maupun disinsentif. "Sehingga solusi kepada pelaku usaha dan kepentingan kenaikan pendapatan daerah berjalan seiringan," tandas Candra. (inu/pr/ab)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005